

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang menamainya sebagai kegiatan amal (Pratama, 2019).

Kesejahteraan sosial dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi tentang Lembaga – Lembaga, program – program, dan kebijakan – kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan – pelayanan sosial kepada individu – individu, kelompok – kelompok, dan masyarakat – masyarakat.

Menurut Walter A. Friedlander menefinisikan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Social welfare is the organized system of social services and institutons, desained to aid individuals and groups to attain satisfying standard of life and health and personal and social relationships which permint them to develop their full capacities and promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.”

Menurut Friendlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standart Kesehatan, dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga

negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, Kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi yang dimiliki sesamanya.

Menurut Undang – Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan mereka secara layak dan bermartabat.

Pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut (Suharto, 2009) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah :

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.”

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan – pelayanan sosial dan institusi – institusi yang dirancang untuk membantu individu – individu dan kelompok – kelompok guna mencapai standart hidup dan Kesehatan yang memadai dan relasi – relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengemangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan – kebutuhan keluarga masyarakatnya (Karso, 2021).

Mengacu pada konsep tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang. Usaha untuk mencapai kesejahteraan tidak dapat berjalan secara mulus, tetapi terdapat berbagai hambatan dan kendala. Demikian, pula untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang agak sulit untuk menentukan indikatornya. Meskipun demikian pemerintah berusaha memberikan garis kebijakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang.

Namun, kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisi yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kesejahteraan sosial mampu untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah yang di hadapi oleh klien, menurut Scheneidermen (1972) dalam Fahrudin (2014: 10) tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yaitu: “Pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem”. Dari ketiga tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai – nilai dan norma sosial serta aturan – aturan kemasayarakatan dalam masyarakat.

b. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai – nilai sosial. Kegiatan – kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan tersebut meliputi, mengintensifkan fungsi – fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan untuk menjangkau fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah.

c. Perubahan sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

2.1.3 Fungsi – Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekana – tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan – perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi – konsekuensi sosial yang negative akibat pembangunan serta menciptakan kondisi – kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Friedlander & Apte, 1982).

Fungsi – fungsi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:12) yaitu:

1) Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindari dari masalah – masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan dalam kegiatan – kegiatan untuk membantu menciptakan pola – pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga – lembaga sosial baru.

2) Fungsi Penyembuh (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi – kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

3) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber – sumber daya sosial dalam masyarakat.

4) Fungsi Pendukung (*Supportive*)

Kesejahteraan sosial mencakup kegiatan – kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

2.1.4 Komponen – Komponen Kesejahteraan Sosial

Selain memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang mempelajarinya, kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa komponen yang sangat penting. Komponen – komponen ini membedakannya dari kegiatan lainnya.

Dikutip dalam Fahrudin (2012: 16) komponen – komponen dalam kesejahteraan sosial antara lain (Rudi Haryanto, 2019):

1) Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula.

2) Pendanaann

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising*) merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kegiatan kesejahteraan sosial tidak hanya mencari keuntungan.

3) Tuntutan kebutuhan manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja, hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

4) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan Teknik – Teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

5) Kebijakan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang – undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan dan pengakhiran pelayanan.

6) Peran serta masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peran serta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam hal ini adalah peran serta dari penyandang disabilitas untuk dapat turut serta berpartisipasi dalam mengikuti program peningkatan kapasitas diri untuk meningkatkan keterampilannya.

7) Data dan informasi kesejahteraan sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

2.2. Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi dimana dalam pelaksanaannya membantu untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang melalui berbagai pendekatan. Pekerjaan sosia merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial.

Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah pekerjaan sosial. Selain itu, Zastrow pun menjelaskan bahwa pekerjaan sosial sebagai suatu profesi memiliki fungsi dan tugas pokok untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai keberfungsian sosial orang melalui proses interaksi sosial.

Pekerjaan sosial menurut Zastrow dikutip oleh Suharto (2011:32) adalah :

Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari definisi tersebut bahwa praktik pekerjaan sosial yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli pekerja sosial, tujuan dari pekerjaan sosial yaitu berfokus pada keberfungsian sosial individu, kelompok dan masyarakat agar terciptanya suatu kondisi yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud yaitu terpenuhinya kebutuhan hidupnya serta dapat melakukan peran sosialnya sebagaimana semestinya.

Pekerja sosial yang didefinisikan oleh Rukminto, (2013:18) adalah sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dengan mengutamakan teori – teori perilaku manusia dan system sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disini peran perilaku dan teori teori yang terkait dengan system sosial memainkan peranan penting. Secara tersirat disini juga terlihat bahwa psikologi dan sosiologi akan memainkan peranan dalam perkembangan praktik pekerjaan sosial.”(Rukminto, 2013)

Tujuan utama dari praktik pekerjaan sosial yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial. Ketika berfungsi sosialnya maka mereka dapat melakukan

sesuatu hal untuk mengupayakan kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan dan mencapai kehidupan yang lebih baik.

Banyak pilar penting yang telah dibangun untuk mengembangkan praktik Pekerjaan Sosial di Indonesia. Sudah ada UU yang menuntut profesi Pekerjaan Sosial untuk melaksanakan praktik, seperti (a) UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan pendampingan Pekerja Sosial bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, (b) UU tentang Sisdiknas atau peraturan turunannya yang mengharapka adanya praktik Pekerjaan Sosial di sekolah, (c) UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (d) UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjadi panduan utama dalam penciptaan kerangka sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

UU ini menyebutkan pekerja sosial sebagai “*the primary profession*” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adanya kebutuhan terhadap standar registrasi, akreditasi, dan sertifikasi. Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Indonesia (LSPSI) serta Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) sebagai pilar pengendali praktik pekerjaan sosial maupun lembaga pelayanan kesejahteraan sosial juga telah terbentuk dan akan terus berkembang.

Maka dari itu, untuk mewujudkannya dibutuhkan beberapa upaya yang harus dilakukan salah satunya melalui penulisan artikel ini diharapkan dapat mengubah paradigma khalayak akan pekerja sosial sebagai suatu profesi begitupun dengan lapangan praktik pekerja sosial akan lebih diakui oleh semua pihak.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki peran yang sangat beragam, tergantung pada konteksnya. Secara umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, fasilitator atau pendamping, pembimbing perencanaan, dan pemecahan masalah. Pekerjaan sosial adalah upaya untuk meningkatkan keberfungsian individu dan meningkatkan efektivitas lembaga yang bertanggung jawab atas penyediaan sumber. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014: 66) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan – kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping).
- b. Menghubungkan orang dengan system – system yang memberikan kepada mereka sumber – sumber yang memberikan kesempatan – kesempatan.
- c. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusia dari system – system yang menyediakan orang dengan sumber – sumber dan pelayanan – pelayanan.
- d. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial
- e. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk – bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
- f. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber – sumber melalui advokasi dan Tindakan – Tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
- g. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.

- h. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam – macam.

Tujuan tersebutlah yang menjadi misi pekerja sosial dalam melakukan praktik pertolongan inividu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah. Dimana pekerja sosial berusaha untuk memelihara serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat.

2.2.3 Nilai dan Kode Etik dalam Pekerjaan Sosial

Setiap profesi pasti memiliki kode etik dan nilai – nilainya sendiri. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa profesi tersebut tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang dari aturan. Hal tersebut tidaklah terkecuali pada profesi pekerjaan sosial, menurut Reamer (1999: 26) dalam Huda (2009: 143) secara umum untuk bentuk nilai yang dapat dinuklikan dari kode etik NASW (*National Association Of Social Worker*) antara lain:

- 1) Pelayanan

Prinsip etiknya adalah pekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial.

- 2) Keadilan Sosial

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial wajib untuk menentang ketidakadilan sosial. Rujukan inti pekerjaan sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial.

3) Harkat dan Martabat Seseorang

Prinsip etik dan nilai ini adalah pekerja sosial menghormati harkat dan martabat seseorang.

4) Mementingkan Hubungan Kemanusiaan

Prinsip etik dari nilai ini adalah pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan.

5) Integritas

Prinsip etik dan nilai ini adalah pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya.

6) Kompetensi

Prinsip etik dan nilai ini adalah pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalismenya dalam proses pertolongan yang dilakukan.

2.3. Konsep Masalah Sosial

2.3.1 Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial bisa didefinisikan sebagai suatu hal yang bisa mengancam kepentingan perorang atau keompok, masalah sosial juga sering diartikan sebagai satu realitas sosial yang bagi masyarakat umum perlu adanya pembedulan atau pembenahan agar sesuai dengan hal yang diinginkan oleh masyarakat umum. Definisi secara sosiological tentang masalah sosial ialah pertama, masalah sosial terjadi Ketika adanya satu realitas yang muncul dan realitas itu berbeda dengan yang ideal atau yang berada di satu masyarakat tertentu (Sari, 2018).

Soejono Soekanto (2013:314), mengungkapkan masalah sosial berpendapat bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antar unsur – unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial atau masyarakat, yang membahayakan terpenuhinya keinginan – keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat pada realita yang ada. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud menjadi hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya.

Menurut Robert K. Merton yang dikutip dalam Huraerah (2011:5) mendefinisikan masalah sosial sebagai berikut:

“Masalah sosial mendefinisikan dengan menyebutkan ciri – ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri – ciri masalah sosial itu adalah adanya jurang perbedaan yang cukup signifikan antara standar – standar sosial dengan kenyataan sosial”.

Oleh karena itu, Merton menyatakan bahwa masalah sosial selalu mengacu pada perbedaan antara harapan – harapan yang ada, baik pada individu maupun suatu kelompok, antara kenyataan sosial dan harapan – harapan individu seharusnya bertindak dan apa yang dapat diperoleh dalam suatu masyarakat. Menurut definisi di atas, masalah sosial adalah suatu kondisi antara keinginan dan harapan yang tidak sesuai dan kurangnya pemecahan masalah.

2.3.2 Komponen – Komponen Masalah Sosial

Menurut Parillo (1987: 14) dalam Soetomo (2015) menyatakan mengenai komponen masalah sosial sebagai berikut:

“Masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberasaan empat unsur tadi”.

Komponen – komponen yang terdapat dalam masalah sosial adalah sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah menghilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik pada individu maupun masyarakat.
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai – nilai atau standart sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Komponen ini berhubungan satu sama lain, masalah sosial hanya dapat bertahan lama, dapat dirasakan oleh banyak orang, menyebabkan kerugian, dan akhirnya membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah sosial.

2.3.3 Upaya Pemecahan Masalah Sosial

Suatu Tindakan dalam upaya pemecahan masalah sosial yang menjadi tujuan yaitu apabila dapat menghapus dan menghilangkan masalah – masalah tersebut dari realitas kehidupan sosial. Namun suatu upaya dalam pemecahan masalah sosial tidak harus menghapus dan menghilangkan masalah tersebut, melainkan setidaknya mengurangi ataupun membatasi berkembangnya masalah sosial. Menurut Soetomo (2015: 53) upaya dalam memecahkan sebuah masalah sosial, yaitu sebagai berikut.

1) Usaha Rehabilitatif

Focus utama usaha ini terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap bermasalah, menjadi kondisi yang sesuai harapan atau standar sosial yang berlaku.

2) Usaha preventif

Usaha preventif mempunyai focus perhatian pada kondisi masalah sosial yang belum terjadi, walaupun mungkin saja di dalamnya terkandung potensi munculnya masalah sosial.

3) Usaha developmental

Usaha Developmental dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seorang atau sekelompok orang agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik.

Dari ketiga upaya pemecahan masalah sosial diatas memiliki fokusnya masing-masing yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai upaya dari pemecahan masalah usaha tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya masalah sosial serta membuat potensi terjadinya masalah sosial berhenti.

2.4. Konsep Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh suatu pihak yang terkait yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, keberfungsian sosial dan perpecahan sosial yang sifatnya patologis ataupun non patologis yang didukung oleh pemerintah, intansi, lembaga sehingga memperoleh hasil positif sebagai adanya suatu perubahan.

Pelayanan sosial menurut Kahn, (Fachrudin, 2014:51) adalah: Pelayanan sosial dapat ditafsirkan dalam konteks kelembagaan sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Menurut Walter Friedlander dalam Wibhawa dkk (2010: 24) menyatakan bahwa pelayanan sosial juga disebut sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah sistem dengan struktur yang baik, sebagai bagian dari usaha-usaha dan lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu ataupun kelompok dalam mencapai hubungan baik antar perseorangan maupun kelompok sehingga dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya secara penuh, serta mempertinggi kesejahteraan selaras dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Syafitri, 2021).

Dalam mengembalikan keberfungsian sosial seseorang pentingnya suatu pengantar atau sebagai akses pertolongan yakni dengan menggunakan suatu pelayanan sosial, yang dimana pelayanan sosial menurut Romanyshyn (1971) dalam fahrudin (2012) yaitu :

memberikan arti pelayanan sosial sebagai usaha – usaha untuk mengembalikan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu-individu dan keluarga melalui sumber – sumber sosial pendukung, dan proses – proses yang meningkatkan kemampuan individu – individu dan keluarga – keluarga untuk mengatasi stress dan tuntutan – tuntutan kehidupan sosial yang normal.

Pentingnya melakukan upaya untuk memberikan bantuan atas masalah yang dihadapi seseorang yang dimana usaha tersebut bertugas bukan hanya bantuan akan tetapi mengembalikan dan mempertahankan peran seseorang

Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya berbagai pelayanan sosial. Menurut (Rukminto, 2013:107) didefinisikan sebagai :

Pelayanan sosial itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Layanan sosial itu sendiri dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok – kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa pelayanan sosial adalah suatu program untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah – masalahnya dan juga membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang dimana ini ditujukan individu, kelompok dan masyarakat.

2.4.1 Bidang – Bidang Pelayanan Sosial

Aktifitas pekerja sosial dalam pekerjaan mereka dikenal sebagai pelayanan sosial. Pelayanan sosial adalah solusi untuk kebutuhan, kesulitan, dan perubahan yang dialami oleh masyarakat. Oleh karena itu, bidang pelayanan sosial akan bergantung pada cara pekerja sosial. Melihat dan menemukan masalah sosial di masyarakat. Jika lingkup masalah sosial-ekonomi ke masalah sosial-psikologis, maka lingkup pelayanan sosial juga harus demikian (Kisworo, 2020).

Apabila menutip dari Merton dan Nisbet (1976) yang dikutip Whibawa (2010:76-77) mendefinisikan bidang – bidang pelayanan sosial adalah:

- 1) Perilaku Penyimpang (*Deviant behavior*)
 - a) Tindakan kejahatan dan kenakalan remaja (*Crime and juvenile Delinquency*).
 - b) Gangguan – gangguan mental (*mental disorders*)
 - c) Penggunaan obat – obatan terlarang (*drugs abuse*)
 - d) Kecanduan alcohol dan permabukan (*alcoholism and drinking*)
 - e) Perilaku seksual (*sexual behavior*)
- 2) Disorganisasi Sosial (*social disorganization*)
 - a) lansia (*age and aging*)
 - b) peranan – peranan seksual (*sex roles*)
 - c) ras dan hubungan antar kelompok di dalam masyarakat (*race and intergroup relation*)
 - d) disorganisasi keluarga (*family disorganization*)
 - e) disorganisasi komunitas dan masalah – masalah perkotaan (*community disorganization and urban problems*)
 - f) dunia pekerjaan (*the world of work*)
 - g) kemiskinan dan proletariat (*poverty and proletariat*)
 - h) kekerasan kolektif (*Collective violence*)

2.4.2 Pelayanan Sosial Berbasis Pant

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi atau perkumpulan

sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Lembaga pelayanan sosial sebagai salah satu wujud organisasi pelayanan manusia mempunyai berbagai jenis pelayanan sosial yang diberikan kepada kliennya. Jenis pelayanan yang diberikan dalam pelayanan berbasis panti sosial adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan pengasramaan yaitu pelayanan pemberian tempat tinggal sementara pada klien
- b. Pelayanan kebutuhan pangan yaitu pelayanan pemberian makan, minum dengan berbagai menu yang telah ditetapkan agar tingkat gizi klien terjamin kualitasnya.
- c. Pelayanan konseling yaitu bimbingan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain, menjalankan peran sosial, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.
- d. Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pengontrolan dan pengecekan Kesehatan klien oleh tenaga medis, agar diketahui tingkat Kesehatan klien.
- e. Pelayanan Pendidikan yaitu pelayanan pemberian kesempatan kepada klien untuk mengikuti Pendidikan baik formal maupun non formal.
- f. Pelayanan keterampilan yaitu pelayanan bimbingan keterampilan pertukangan, perbengkelan, kerajinan tangan, komputer, pertanian, peternakan dan sebagainya.

- g. Pelayanan bimbingan spiritual yaitu pelayanan keagamaan dengan menjelankan aktivitas agama masing – masing klien dan mengikuti ceramah – ceramah keagamaan.
- h. Pelayanan rekreasi dan hiburan yaitu pelayanan yang ditujukan untuk memberikan rasa gembira dan senang melalui permainan musik dan berkunjung kesuatu tempat rekreasi.

2.5. Konsep Lanjut Usia

Menurut UU 13 Tahun 1998, lansia yaitu individu baik perempuan atau laki – laki yang masih bisa bekerja maupun yang sudah tidak bisa beraktifitas yang telah berusia 60 tahun atau bahkan lebih. Menua merupakan salah satu tahap ilmiah yang harus kita lewati dalam tahap menua, pada tahap ini secara satu persatu kemampuan jaringan dalam memperbaiki dan mempertahankan fungsinya secara normal akan menghilangkan akibatnya akan berdampak pada beberapa masalah fisik seperti terjadinya osteoporosis yang menyebabkan lansia harusn menjalani tirah baring dalam jangka waktu yang sangat lama (Wilar, 2021).

Definisi lansia menurut surini & Utomo (2003) yang dikutip dalam Azizah, 2011) menyatakan bahwa:

Lanjut usia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut usia dari suatu proses kehidupan yang akan dijalani semua individu, ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh atau beradaptasi dengan stress lingkungan.

Lanjut usia didefinisikan sebagai orang telah tua yang menunjukkan ciri fisik seperti kerutan kulit, hilangnya gigi, dan rambut beruban. Dalam hidup kebermasyarakat tidak bisa lagi dapat melakukan fungsi peran sebagai orang

dewasa, seperti halnya pria yang tidak lagi terikat dalam kegiatan ekonomi produktif, dan untuk wanita tidak dapat memehuni tugas yang terkait dengan rumah tangga.

Berdasarkan uraian teori tersebut bisa disimpulkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang usianya mencapai 60 tahun. Lanjut usia bukanlah suatu penyakit melainkan proses lanjutan yang pasti akan di alami oleh setiap individu yang lahir di dunia ini, yang di tandai dengan penurunan fungsi kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stress lingkungan.

2.5.1 Ciri – Ciri Lansia

Menurut Oktora & Purnawan, (2018) Adapun ciri dari lansia diantaranya:

- a. Lansia merupakan periode kemunduran, kemunduran pada lansia sebgaiian datang dari factor fisik dan factor psikologis sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalya lansia yang memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik, akan tetapi ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik lansia akan lebih lama terjadi.
- b. Penyesuaian yang buruk pada lansia, perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Seperti lansia yang tinggal Bersama keluarga tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno, kondisi ilmiah inilah yang

menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri rendah.

2.5.2 Konsep Panti Sosial

Panti sosial *tresna werdha* merupakan tempat pelayanan sosial bagi lanjut usia. Dilihat dari strategi pelayanan sosial, maka panti *werdha* termasuk dalam institusional *based service*, yaitu dalam pelayanan ini individu yang mengalami masalah ditempatkan dalam Lembaga pelayanan sosial (Shinta Puji Triwanti, 2014).

Panti *Wreda* juga dikenal sebagai rumah perawatan lanjut usia, dirancang untuk lanjut usia yang tidak memiliki sanak saudara atau teman yang dapat membantu mereka sehingga pemerintah wajib melindungi lansia dengan menyelenggarakan panti *wreda* (Darmojo, 2009).

Di panti sosial ada beberapa pekerja sosial dan pramuwerdha yang siap membantu lanjut usia yang sudah tidak mandiri dalam kegiatan sehari – harinya, seperti mandi, makan, bahkan pergi ke tempat tidur. Para pramuwerdha telah dibekali persiapan khusus untuk membantu lanjut usia kapanpun mereka membutuhkan bantuan.

Panti *werdha* yang di miliki oleh pemerintah dan swasta memiliki berbagai sumber daya untuk mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan lanjut usia yang terus meningkat. Panti *werdha* berfungsi sebagai pusat pelayanan kesejahteraan lanjut usia dengan menyediakan suatu tempat berupa bangunan dan memberikan kesempatan bagi lanjut usia untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial

dengantujuan untuk menjalani proses penuaan dengan sehat dan mandiri. Namun, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku panti werdha bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pelayanan sosial yang diberikan oleh panti sosial berupa pelayanan-pelayanan seperti bimbingan sosial, bimbingan kesenian, bimbingan keterampilan yang bertujuan untuk mengisi waktu luang pada lanjut usia juga mmebuat mereka tetap produktif walaupun berada di dalam panti sosial.

2.5.3 Klasifikasi Lansia

Menurut WHO (2013), klasifikasi lansia adalah sebagai berikut :

- 1) usia pertengahan (*middle age*), yaitu kelompok usia 45 – 54 tahun.
- 2) Lansia (*elderly*), yaitu kelompok usia 55 – 65 tahun.
- 3) Lansia muda (*young old*), yaitu kelompok usia 66 -74 tahun.
- 4) Lansia tua (*old*), yaitu kelompok usia 75 – 90 tahun.
- 5) Lansia sangat tua (*very old*), yaitu kelompok usia lebih dari 90 tahun.

Seringkali, kesehatan lansia tidak diurus karen abeberapa masyarakat menanggapi lansia sering sakit dan marah sebagai hal yang normal. Jadi, pemerintah berusaha menjaga kesehatan orang tua dengan memastikan ketersediaan fasilitas medis dan posyandu untuk orang tua (UU RI, 2009). (Derajat Kesehatan Lansia Melalui Penyuluhan dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia di Dusun Mrisi Yogyakarta Setyo Retno Wulandari & Winarsih, 2023)

2.5.4 Karakteristik Lanjut Usia

Setiap individu di masa tuanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Namun, ada beberapa ciri umum lansia yang wajib diperhatikan, di antaranya:

1. Penurunan fisik, seperti kekuatan dan keseimbangan tubuh yang menurun.
2. Penurunan kognitif, seperti daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir yang menurun.
3. Gangguan psikologis, seperti depresi, ketakutan, dan rasa kesepian.
4. Penurunan kemampuan sosial, seperti keterbatasan mobilitas dan ketergantungan pada orang lain.

2.6. Konsep Kesehatan Lanjut Usia

2.6.1 Pengertian Kesehatan

Menurut WHO, Sehat adalah keadaan utuh fisik, jasmani, mental dan sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan Kesehatan adalah suatu keadaan sehat jasmani, mental dan sosial. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 mendefinisikan Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Sehat fisik adalah Ketika tidak ada rasa sakit dan tubuh dan organ dalam kondisi yang normal. Menurut pendapat lain, sehat fisik adalah Ketika tubuh dan fatalnya tidak mengalami gangguan, yang memungkinkan pertumbuhan mental dan sosialnya dan melakukan kegiatan sehari – hari dengan optimal.

Sehat mental ialah kondisi perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang. Dalam arti lain, sehat mental adalah keadaan dimana jiwa dan pikiran kita dapat berpikir secara logis dan memahami orang lain.

Sehat spiritual adalah kondisi seseorang memperlihatkan kehidupannya yang mengakui adanya Tuhan dan beribadah sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat, serminan sehat spiritual ini adalah adanya rasa syukur, memaafkan, pengendalian diri, menyayangi dan ajaran baik pada agamanya.

Namun, sehat sosial adalah Ketika seseorang dapat hidup berdampingan dengan orang lain, mengikuti aturan masyarakat, dan diterima sebagai anggota masyarakat. Pengertian lain adalah bahwa setiap warga negara memiliki kemampuan untuk memajukan kehidupan sendiri dan keluarganya dalam komunitas yang memungkinkannya bekerja, beristirahat dan menikmati hiburan.

Seiring bertambahnya usia manusia, terjadi proses penuaan degeneratif yang biasanya melibatkan perubahan pada jiwa atau diri manusia, tidak hanya perubahan fisik, tetapi juga perubahan kognitif, emosional, sosial dan seksual (National & Pillars, 2020).

Kesepian muncul ketika pasangan atau teman dekat meninggal dunia, terutama ketika kondisi kesehatan lansia memburuk, misalnya ketika orang tersebut menderita penyakit fisik yang serius, gangguan motorik, gangguan sensorik, dan terutama gangguan pendengaran. Lansia perlu menyesuaikan diri akibat dari perubahan disebabkan oleh penuaan. Kesehatan fisik dan mental lansia dapat terganggu jika mereka terlalu lama menyesuaikan diri.

2.6.2 Tujuan Pelayanan Kesehatan Pada Lansia

Pelayanan pada umumnya selalu memberikan garis besar yang memudahkan petugas kesehatan dalam menyediakan layanan sosial, kesehatan, perawatan, dan meningkatkan kualitas layanan untuk lansia. Tujuan pelayanan kesehatan pada lansia adalah untuk memastikan bahwa para lansia tetap sehat, menghindari penyakit atau gangguan, mempertahankan kondisi fisik dan mental, berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa para lansia yang menderita penyakit atau gangguan dapat mempertahankan kemandirian yang optimal, dan memberikan dukungan moral dan perhatian kepada para lansia.